

WIDYA AKSARA

Jurnal Agama Hindu

Volume 30 Nomor 2 September 2025

MEMBANGUN KEBERSAMAAN UMAT HINDU KABUPATEN BLITAR

Sujaelanto

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah

Email: sujaelanto@gmail.com

ABSTRAK

Agama tidak saja sebagai pedoman hidup pribadi setiap orang, tetapi juga menjadi perekat sosial berkehidupan sosial keagamaan di masyarakat. Namun realitasnya agama juga memberikan andil terjadinya pertentangan dan perpecahan apabila menafsirkan ajarannya tidak komprehensif. Di jaman sekarang ini orang kaya yang semestinya membantu, melainkan mengharapkan untuk dibantu. Punia dalam Hindu mengajarkan bagaimana memberikan sebagian hartanya untuk dapat dinikmati orang lain. Pemberian dari sebagian dari yang dimilikinya, apakah dilandasi karena kepatuhan terhadap agama atau karena ada hal lain yang menyebabkan seseorang melakukan punia?

Dalam tulisan ini akan menyajikan bagaimana dimensi sosial punia membangun kebersamaan umat Hindu Kabupaten Blitar? Permasalahan tersebut dianalisis dan dijelaskan dengan menerapkan teori Semiotika. Berdasarkan analisis diperoleh gambaran bahwa Punia adalah ajaran yang memiliki dimensi sosial dan juga spiritual. Secara sosial punia membentuk sikap dan perilaku yang peduli terhadap kebutuhan pihak lain. Secara spiritual punia sebagai pengendalian diri dari keserakahan. Atas kepedulian tersebut, umat Hindu menyumbangkan secara sukarela sebagian dari hartanya untuk kepentingan sosial yang lebih luas dari pada kepentingannya sendiri. Punia dilakukan untuk kelompok atau individu yang membutuhkan atau kurang mampu, tetapi juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan social keagamaan dan atau dalam membangun tempat social keagamaan. Punia tidak saja diwujudkan materi, tetapi punia bisa diwujudkan tenaga, pengetahuan, keahlian, dorongan moral, pengendalian indria. Punia dilaksanakan atas dasar perintah ajaran agama serta nilai kemanusiaan. Kesadaran dan kepedulian berdana punia bagi umat Hindu menjukan sikap antusias umat dalam mengamalkan ajaran agama. Kata Kunci; Punia, umat Hindu Kab Blitar.

ABSTRACT

Religion is not only a guide for each person's personal life but also serves as a social glue for socio-religious life in society. However, in reality, religion also contributes to conflict and division when its teachings are interpreted in an incomprehensible manner. In today's world, the wealthy, who should be helping, instead expect to be helped. The Hindu concept of "punia" teaches us to give a portion of our wealth so that others can enjoy it. Is giving part of one's possessions based on religious obedience or is there something else that motivates someone to give "punia"?

This paper will present how the social dimension of "punia" fosters unity among Hindus in Blitar Regency. This issue is analyzed and explained using semiotic theory. The analysis reveals that "punia" is a teaching with both social and spiritual dimensions. Socially, "punia" fosters attitudes and behaviors that care for the needs of others. Spiritually, "punia" serves as self-control against greed. Based on this concern, Hindus voluntarily donate a portion of their wealth for social purposes greater than their own. Offerings of alms (punia) are given to groups or individuals in need or underprivileged, but are also undertaken as an effort to meet the needs of socio-religious activities and/or to build social and religious facilities. Offerings are not only material but can also be expressed through labor, knowledge, skills, moral encouragement, and sense control. Offerings are carried out based on religious teachings and humanitarian values. The awareness and concern for offering alms (punia) among Hindus demonstrates the community's enthusiasm for practicing religious teachings.

Keywords: Punia, Hindus of Blitar Regency.

I. PENDAHULUAN

Blitar adalah bumi Bung Karno, karena daerah ini menjadi tempat bersemayamnya tokoh sang plokamator. Blitar memiliki karakteristik tersendiri dengan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dalam pembangunan agama. Kegiatan keagamaan Hindu kabupaten Blitar mengikuti sifat dan karakteristk masyarakat agraris yang hiruk pikuk dengan kegiatannya dilahan mereka. Pembangunan pura dianggap sebagai kegiatan istimewa yang dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu yang cukup lama karena terdapat kendala pendanaan. Begitu juga pembangunan sarana social keagamaan Hindu lainnya di Kabupaten Blitar juga mengalami nasib yang sama. Pura dengan segala ritualnya memerlukan dana yang cukup besar. Apabila dilihat dari kuantitas warga Hindu yang berjumlah 29.203 jiwa, dapat dikatakan di Kabupaten Blitar memiliki prestasi besar dalam upaya mewujudkan 103 bangunan pura beserta dengan kegiatan ritualnya.

Proses penggalangan punia dilakukan dengan berbagai cara untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Penggalangan dilakukan pengumpulan punia dan juga menggugah para donatur untuk memberikan dana melalui mekanisme proposal. Penggalan punia di Kabupaten Blitar di satu sisi menunjukkan adanya kesulitan, meskipun mereka yakin dapat menyelesaikan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya gejala sosial bagi Umat Hindu di Kabupaten Blitar, sekalipun substansi dan esensi religiusitasnya berbeda, bahkan terdapat indikasi adanya sikap umat yang bersifat paradoks atau berlawanan sekalipun tidak bertentangan.

Umat Hindu di Kabupaten Blitar dengan setting dan situasi tingkat perekonomian mereka yang homogen, pasti memiliki alasan yang beragam dan juga bersifat rasional di balik penggalangan *punia* untuk kepentingan pelaksanaan upacara ritual keagamaan. Terkait dengan fenomena tersebut, Agus (2006) mengatakan, bahwa ada tatacara perlakuan terhadap sesuatu yang di sakralkan. Ada upacara keagamaan yang berhadapan dengan yang sakral. Upacara dan perlakuan khusus ini tidak sepenuhnya dapat dipahami berdasarkan alasan-alasan ekonomi dan rasional. Frans Magnis Suseno menyampaikan pandangan yang setara dengan pandangan Agus mengenai upacara ritual. Menurut Suseno (1985) upacara ritual adalah tatacara sebelum agama besar itu mengklaimnya. Sejak semula suku-suku asli percaya pada satu Tuhan, pada penghayatan keagamaan asli itu, seluruh alam diresapi oleh kekuatan-kekuatan gaib yang tidak kelihatan. Kekuatan-kekuatan itu, ada yang melindungi desa, ada pula yang mengancam. Melalui sesaji, ritus, dan doa-doa, dengan memperlihatkan berbagai pantangan, dan dengan mengatur seluruh cara

hidup dalam kesucian dan kepercayaan bersama, orang berusaha untuk hidup aman. Antara realitas alami, realitas sosial (masyarakat), dan adi-duniawi menyatu.

Penggalan punia yang sukses, tetapi tanpa melibatkan masyarakat tidak memiliki arti dan akan muncul kekawatiran dan prasangka. Jikalau penggalan dana sudah melampaui batas kebutuhan, apakah punia sudah dianggap cukup?. Dengan demikian persoalan dana tetapi menjadi primadona tercapainya tujuan yang diharapkan, tetapi dimensi sosial lainnya juga perlu mendapat perhatian.

Dalam tulisan ini membedah fenomena bagaimana umat Hindu Kabupaten Blitar mengupayakan punia untuk mengikat kebersamaan membangun kesemarakan pura, upacara dan sosial keagamaan? Permasalahan tersebut dianalisis dan dijelaskan dengan menerapkan teori hegemoni dan Semiotika.

II. PEMBAHASAN

1). Pengertian dan Bentuk Dana Punia

Punia secara harfiah adalah menyalurkan atau membagi. Ketika punia di kaitkan dengan uang sehingga memiliki pengertian menyalurkan, membagi sebagian uang. Obyek dari penyaluran uang tersebut bisa ditujukan kepada orang atau kelompok orang dalam wujud organisasi. Dalam Sarascamuscaya sloka 170 disebutkan yang disebut dana (sedekah) kata sang pandita ialah sifat tidak dengki, dan yang taat berbuat kebajikan, sebab jika tetap terus menerus begitu senantiasa akan diperoleh keselamatan, sama pahalanya dengan amal saleh yang berlimpah-limpah.

Kitab Sang Hyang Kamahanikan membedakan tiga jenis punia yakni; Dana adalah pemberian harta/materi kepada yang membutuhkan. Atidana adalah pemberian dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mahatidana adalah pemberian berbentuk jiwa raga. Pemberian tidaklah semata dalam wujud benda/materi, tetapi dapat berwujud tenaga, keahlian, dorongan moral, pengendalian indria. Menurut Swami Wiwekananda ada tiga yang termasuk dana punia, yaitu Dharmadana adalah memberikan budi pekerti yang luhur untuk merealisasikan ajaran dharma. Widyadana adalah memberikan ilmu pengetahuan. Arthadana adalah memberikan materi atau harta benda yang dibutuhkan, asalkan didasari dengan rasa tulus dan ikhlas, serta diperoleh dengan jalan dharma. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa apapun wujud yang diberikan adalah esensi dari punia. Kualitas punia bukan karena besar atau kecil, tetapi ketulusan.

2). Peranan Parisada Hindu dalam Penggalan punia

Organisasi keagamaan Hindu yang memiliki tingkat kepengurusan secara hirarkis mulai tingkat nasional hingga desa adalah Parisada, sedangkan yang lain hanya pada tingkat kabupaten yakni Lembaga Pengembangan Dharmagita, Wanita Hindu Dharma Indonesia dan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Parisada sebagai leading sector yang memiliki legitimasi untuk menggerakkan punia yang selama ini masih dalam mencari jatidiri dan legitimasi dari pemerintah tampaknya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu sudah saatnya umat tanpa tergantung dari pemerintah, mampu pengumpulan punia. Sejalan dengan pemikiran Hebermas, bahwa kesadaran religius didesak untuk melakukan proses- proses penyesuaian diri. Setiap agama pada hakikatnya adalah pandangan hidup untuk

menstruktirisasi suatu gaya hidup yang menyeluruh. Tuntutan untuk memonopoli inteprestasi dan untuk melakukan penataan hidup yang menyeluruh harus dilepaskan oleh agama dalam kondisi sekulerisasi pengetahuan, netralisasi kekuasaan negara dan kebebasan beragama yang diperluas (Kleden-Sunarko.2010)

Kurang geliatnya punia salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penjelasan yang benar tentang punia dan penerapan manajemen yang belum sistemik dan transparan. Akibat dari itu, Media Hindu juga menyitir, bahwa punia yang dihimpun melalui Badan Dharma Dana Nasional tidak mencapai angka ratusan juta. Lembaga agama Hindu (parisada) dalam rangka menggalang punia kepada umat dengan melalui jalur hirarkis seperti mendirikan Badan Dharma Dana Nasional baik ditingkat provinsi ataupun kota belum mendapat respon yang diharapkan, salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi. Lembaga Artha yang pernah dibentuk oleh Parisada untuk menghimpun dana punia sudah hilang gaungnya, karena kurang mendapat dukungan serius oleh umat (Majalah Raditya 6 Sempetmber 2002).

Penggalan Dana Punia sudah dihimbau oleh Parisada dalam Ketetapan Mahasabha no IV/Tap/M.Sabha/1980 tentang Tata Kemasyarakatan, di bagian d disebutkan untuk mendukung dan menunjang semua kegiatan oleh karena itu penggalan dana dari segala sumber secara syah juga perlu digalakan. Penggalan dana tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yakni dana dari umat, dana dari pemerintah.(Parisada 2005.67-68). Penggalan dana punia sebagai upaya untuk kelancaran suatu kegiatan agama menjadikan tantangan bagi umat Hindu khususnya umat Hindu Kabupaten Blitar. Penggalan dana punia yang telah diisyaratkan dalam keputusan mahasabha yang merupakan keputusan hukum umat Hindu Indonesia dipertegas lagi dalam Bhisama Sabha Pandita no 01Bhisama/SabhaPandita Parisada Pusat/X/ 2002 tentang Dana Punia dan Keputusan Pesamaan Agung no. 010/Kep/P.A/ Parisada/VII/ 2005 tentang Dharma Dana Nasional. Penggalan dan penggunaan Dana Punia memerlukan metoda dan menejemen yang tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sehingga tahun 2006 Parisada mengeluarkan Ketetapan Maha Sabha no IV/Tap/M. Sabha IX/2006 tentang Dharma Dana Nasional pada bagian kedua “menugaskan kepada pengurus harian parisada pusat untuk mensosialisasikan Dharma Dana Nasional ini keseluruh umat Hindu melalui parisada provinsi dan kabupaten/kota. Di bagian ketiga menyebutkan “menugaskan kepada pengurus harian parisada pusat untuk membentuk Badan Dharma Dana Nasional yang menjalankan mekanisme dalam pengumpulan, penyimpanan, menetapkan peruntukan dan mengelola Dharma Dana Nasional sebagai kelanjutandari setiap keputusan parisada Hindu Dharma Indonesia sebelumnya” (Parisada.2006.108).

Kurang gaungnya lembaga ini berdampak pula di Kabupaten Blitar yang berujung belum terbentuk Badan Dharma Dana Nasional tingkat kabupaten. Hal ini tentunya mengingatkan keberadaan kita tentang Lembaga Dana Punia (Badan Dharma Dana Nasonal), walaupun sudah di tetapkan pengakuannya oleh Parisada, tetapi karena sosialisasi sehingga belum bisa mengumpulkan dana punia sesuai yang diharapkan. Sehingga masyarakat Hindu Kabupaten Blitar diperkenankan untuk mengumpulkan Punia sesuai dengan kemampuan umat di wilayah tersebut. Hal yang menarik ketika punia dilakukan pada saat mereka memiliki cadangan uang. Bagi masyarakat petani yang terkadang harapan hasil panen tidak menentu memberikan dampak yang cukup mnengesankan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Parisada sebenarnya merupakan langkah maju dalam rangka mengumpulkan Punia sebagai sumber utama kegiatan keagamaan. Agama Hindu

memiliki kegiatan ritual agama yang cukup banyak sehingga perlu adanya upaya sumber dana yang memadai dan menghimpun dana menjadi dana abadi untuk keperluan ritual maupun kegiatan keagamaan lainnya.

Penggalangan Dana Punia secara structural merupakan impian bagi umat Hindu Kabupaten Blitar. Impian ini hingga saat belum terwujud, karena berbagai hal seperti masalah sumber daya manusia dan belum terang benderang besaran punia yang wajib dilakukan umat. Selain itu juga tidak ada akses untuk melegitimasi termasuk lembaga tinggi agama Hindu. Berbeda dengan saudara umat Islam dalam menggalang dana diberikan payung hukum sehingga dari berbagai lini mereka dapat dengan mudah mengumpulkan dana. Hindu untuk akses menuju birokrasi dalam menggalang Punia mengalami jalan buntu. Tidak berjalannya system Badan Dharma Dana nasional merupakan permasalahan yang berkaitan dengan arus politik kekuasaan. Hubungan antara politik dan agama biasanya muncul pada bangsa-bangsa yang tidak homogen secara agama. Para pemikir politik klasik seperti Aristoteles menegaskan bahwa homogenitas agama adalah suatu kestabilan politik. Apabila kepercayaan-kepercayaan yang berlawanan mengenai nilai-nilai tinggi (ultimate value) masuk dalam arena politik mereka makin jauh dari kompromi (Alford dalam Roland Robertson.1995.379). Pengaruh kuat arus politik berkerstra dengan kelompok agama mayoritas dapat menyulap kondisi yang semakin menjadi kelompok minoritas kurang mendapat pelayan dan hak yang sama. Dalam kehidupan Negara yang agama mayoritas tentunya hak-hak pelayanan agama semakin terbelakang, tidak memiliki kompromi.

Jalan yang dibangun parisada untuk membentuk jaringan punia melalui jalur formal dengan pemerintah tidak kunjung datang. Padahal tegas dalam amanat keputusan Mahasabha IX no IV/Tap.M.Sabha IX/2006 tentang petunjuk teknis mekanisme penyelenggaraan dharma dana nasional. Petunjuk teknis ini tidak mampu menembus kancah pergulatan dalam penggalangan dana karena arus politik dan peraturan lain tidak mendukung. Sehingga umat Hindu Kabupaten Blitar dalam penggalangan dana punia secara organisasi keagamaan teradopsi melalui kelompok sesuai wilayah umat seperti tersebut di atas.

Penggalangan punia melalui kelompok wilayah umat yang di organisisir oleh Parisada wilayah masing-masing merupakan terobosan dan kurang mencerminkan system organisasi masih tumpul yang semestinya digerakan oleh Badan Dharma Dana Nasional tingkat kabupaten. Namun lembaga ini ternyata belum terbentuk, apakah hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi atau mungkin adanya hambatan dari system yang ada dalam lembaga tersebut, tentunya untuk menggali lebih jauh tentang lembaga ini perlu penelitian lebih lanjut.

Parisada tingkat kabupaten sebagai lembaga majelis umat melakukan kemampuannya dengan berbagai kewenangannya untuk memacu penggalangan punia melalui jalur hirakis parisada sampai tingkat desa. Kewenangan yang dijalankan adalah simbol perjalanan kekuasaan yang diterapkan dalam upaya untuk memudahkan penggalangan punia. Nilai-nilai yang mengembuskan pentingnya punia sebagai alat melegitimasi punia menjadi bagian penggalan punia dengan kontrol lembaga melalui idiologi-idiologi agama. Langkah ini menjadi strategis untuk menggalang punia yang semestinya dilakukan oleh Badan Dharma Dana Nasional.

Tidak adanya Badan Dharma Dana Nasional, tidak menyurutkan semangat dan strategi umat Hindu Kabupaten Blitar dalam upaya menghimpun punia guna memenuhi kebutuhan kegiatan ritual / upacara keagamaan maupun kegiatan keagamaan yang harus berjalan sesuai program dan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan- kegiatan keagamaan yang melibatkan

umat secara internal maupun eksternal akan menguras dana yang cukup besar, sehingga umat Hindu Kabupaten Blitar melakukan langkah langkah strategis dalam mengumpulkan punia.

3). Strategi Pengumpulan Punia Umat Hindu Kabupaten Blitar

Mengumpulkan punia selama ini mengalami banyak permasalahan. Beberapa di antaranya adalah keidakpercayaan pemberi dana punia terhadap pengelola punia, ketiadaan dana yang cukup untuk berdana punia pada saat itu, dan kemungkinan pihak yang dimintai dana punia adalah kurang menyadari pentingnya dana punia terhadap berbagai keperluan pihak-pihak lain, baik kelompok maupun individu. Kemungkinan lain, bahwa yang bersangkutan tergolong orang yang berpandangan sekuler yang kurang percaya pada ajaran agama. Fenomena tersebut semestinya ada perbedaan perlakuan penggalangan punia setiap orang. Perbedaan tersebut kemungkinan dari kemampuan masing-masing.

Pengaruh jaman Kaliyoga yang cenderung bahwa seseorang lebih banyak diperbudak oleh materi atau mungkin keberadaan ekonomi. Seperti umat Hindu yang tidak memiliki pekerjaan tetap yang keberadaan ekonomi sebagian besar kurang menguntungkan, memang agak tersendat dalam melakukan punia. Pada jaman Kali Yoga, sastra agama (dharma sastra) menyiratkan bahwa jaman sekarang ini manusia cenderung diperbudak oleh harta. Hal itu dinyatakan secara tegas dalam Kakawin Nitisastra sargah IV.7 yang berbunyi sebagai berikut.

Singgih yan tekaning yugan ta kali tan hana lewiha saking mahadana. Tan waktan guna sura pandita widagdha pada mengayap ing dhanaiswara.

Artinya ; Sesungguhnya bila jaman kali datang pada akhir yuga, hanya kekayaan yang dihargai. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa orang yang saleh dan orang yang pandai akan mengabdikan kepada orang kaya.

Dengan demikian untuk penggalangan dana punia perlu adanya upaya upaya tertentu. Salah satunya digali melalui kegiatan organisasi-organisasi sosial masyarakat Hindu. Berdasarkan kesulitan-kesulitan tersebut, maka para pengumpul dana punia bagi umat Hindu di Kota Semarang menggunakan beberapa strategi, agar pengumpulan dana punia sukses. Adapun strategi yang digunakan adalah sebagai berikut.

a) Dana Punia Melalui Iuran Wajib Anggota Wilayah Umat.

Punia merupakan suatu bentuk aktivitas sosial berupa pemberian sumbangan materi tertentu secara ikhlas. Dengan kata lain, bahwa punia selalu berorientasi pada pemberian yang tidak terikat dalam bentuk paksaan. Ketidak-terpaksaan itulah yang dibahasakan dengan istilah tulus ikhlas atau *lascarya*. Namun demikian, seiring dengan perubahan zaman yang tiada terbendung, maka pemahaman masyarakat mengenai apa yang dikategorikan sebagai sederhana, sedang, dan utama yang dalam kategori pelaksanaan upacara ritual Hindu disebut *nista*, *madya*, *utama* sangat bergantung pada perubahan situasi sosial pada zamannya.

Dalam mengatasi terhambatnya pelaksanaan dana punia, sehingga masyarakat Hindu Kabupaten Blitar melalui jalur alternative sebagai upaya suksesnya dana punia melalui organisasi social kemasyarakatan, sehingga jalan alternative untuk melakukan komunikasi melalui organisasi parisada tingkat desa sebagai ujung tombak dalam mengawal dan menjaring suksesnya punia. Organisasi social keagamaan ini bisa menjebatani karena tidak semua umat Hindu di wilayah Kabupaten Blitar bergabung dalam organisasi ini. Dalam keanggotaan ini, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar iuran/sumbangan yang besaran nominalnya berbeda antara *wilayah umat* yang satu dengan

yang lain. Penggalangan Dana Punia melalui lembaga keagamaan tingkat desa merupakan system yang strategis dalam upaya meningkatkan kesadaran umat Hindu untuk mengamalkan ajaran agama.

b) Dana Punia Melalui Pengajuan Proposal.

Penggalangan Punia dengan mengajukan proposal ditujukan kepada Donatur dan, Instansi Pemerintah/Swasta. Seperti contoh pada saat pelaksanaan Melasti dan Hari Raya Nyepi, panitia Kabupaten Blitar mengajukan proposal kepada calon donator. Mereka yang dianggap donatur bisa dilakukan melalui pendekatan persuasive maupaun pendekatan lain yang dilakukan para panitia penggalangan dana punia. Penggalangan punia kepada instansi pemerintah oleh para panitia penggalangan dana punia yang ditujukan melalui berbagai perpanjangan tangan di dinas-dinas di Kabupaten Blitar terkadang kurang mendapatkan respon.

Keberhasilan penggalangan punia melalui instansi pemerintah, tergantung pada system yang ada pada instansi tersebut, seperti tersedianya post anggaran dan kebijakan aparat pemerintah setempat. Pada saat mengalokasikan anggaran kegiatan keagamaan, kebijakan sangat menentukan. Post anggaran kegiatan setiap agama, sesuai dengan amanat undang undang terwadai, tetapi terwujud dan tidaknya tergantung dari pembuat kebijakan. Bantuan tidak saja berupa rupiah murni yang bisa digunakan untuk keperluan belanja barang, tetapi bantuan dapat diwujudkan bantuan perjalanan yang berupa kendaraan untuk mengangkut peserta kegiatan lomba/ utsawa di Solo.

Untuk mencukupi dana kegiatan keagamaan Hindu di Kabupaten Blitar, terkadang panitia penggalangan punia mengubah alur penyebaran proposal melalui teman dekat yang dianggap berhasil dalam bisnis dan pekerjaan. Langkah yang ditempuh adalah menginformasikan kepada beberapa teman/ sahabat dekat yang sukses bekerja baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengajuan proposal dilakukan melalui dua moment penting yakni pada moment pura atau kegiatan ritual dan moment untuk kegiatan sosial keagamaan. Untuk pembangunan pura ataupun untuk upacara di pura, terkadang berhasil terkadang tidak, tergantung kepada siapa yang mengajukan dan dimana proposal itu di tujukan. Pengajuan proposal kepada para donator mungkin disebabkan karena merasa berulang kali sebagai obyek penggalangan punia ataupun kurang pedulinya terhadap kegiatan tersebut. Penggalangan punia melalui pengajuan proposal kepada perusahaan dan atau pabrik, jarang dan bahkan tidak pernah dilakukan karena di Kabupaten hanya terdapat sebuah penggilingan tebu milik BUMN. Sepertinya wilayah Blitar kurang menjajikan untuk dilirik para investor untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga nyaris tidak bisa menggalang punia untuk kegiatan umat Hindu.

c) Dana Punia Melalui Sesari Banten

Masyarakat Hindu Kabupaten Blitar sudah menjadikan tradisi dalam setiap kegiatan persembahyangan selalu menghaturkan banten, yang dilengkapi dengan canang. Canang dengan berbagai kelengkapannya yang termasuk didalamnya terdapat uang/sari banten. Besaran nilai sari banten tidak ditentukan. Sari Banten secara filosofis sebagai pelengkap sarana upacara. Makna sari banten/uang, sering muncul dalam mantra-mantra upacara, seperti mantra untuk menghaturkan *Segehan*. Adapun mantranya yaitu:

Sang Hyang Purusangkara.....manusa aweh tadah saji sira watek Kala Bhuta kabeh. Iti tadah sajinira sega iwak sambel. Asing kirang luput nyata pipis sabundel patukuna sira ring pasar agung. (Mas Putra.1982)

Artinya, Wahai Sang Purusangkara..... Manusia menghaturkan santapan sesaji (untuk) semua Kala Buta. Makanlah ini sesaji nasi dan lauk sambal. Apabila kurang ini sejumlah uang belilah (makanan) di Pasar Besar.

Menyurut (ambil) kembali sari/uang sudah menjadi tradisi untuk dapat dipergunakan keperluan lainnya. Sari/uang yang di surut tersebut dikumpulkan menjadi dana/kas milik umat Hindu. Sari Banten yang terkumpul untuk kepentingan pura dan sebagian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti piodalan dan memberikan yadnya kepada Pendeta. Di Blitar terdapat 2 pendeta yang berkududukan di Ponggok dan Desa Kendalreja. Keberadaan pendeta tersebut dalam hal fungsi pelayanan umat sangat bermanfaat bagi umat Hindu Blitar.

Kwantitas sari banten di Kabupaten Blitar, tidak sebesar di wilayah perkotaan seperti Surabaya dan Malang dan tergantung dari moment ritual yang dilaksanakan. Ketika persembahyangan hari raya Galungan, di Pura yang besar seperti Praba Bhuana bisa mencapai jutaan rupiah, tetapi pada hari Purna maupun Tilem berkisar angka ribuan rupiah. Hal yang menjadi perhatian para pengurus parisada setempat adalah bagaimana membangun kesadaran umat Hindu untuk berpartisipasi berpunia pada saat persembahyangan melalui media kwaneng. Kurangnya respon umat Hindu mengisi uang di kwangen pada saat bersembahngan adalah prioritas utama dalam rangka menggalang dana punia.

d) Dana Punia melalui Kotak Punia Di Pura

Umat Hindu di Kabupaten Blitar tidak terbiasa atau tidak pernah melakukan penggalan dana punia melalui kotak punia yang diletakkan di jalan-jalan raya ataupun ditempat keramaian seperti di rumah makan/toko. Kotak dana punia cukup dipasang di pintu masuk pura dan di letakkan pada saat kegiatan keagamaan besar lainnya seperti Melasti di pantai Jolosutro. Cara ini tidak sekedar untuk mengumpulkan uang, tetapi sekaligus menjanging dan meningkatkan kesadaran umat Hindu yang datang bersembahyang Melasti. Namun kelihatannya harapan panitia untuk menggalang punia tidak memuaskan. Dari pengamatan, pada saat persembahyangan Melasti tahun 2025, kotak punia yang diletakkan di pintu masuk areal sebelah timur tidak terlihat gejala umat Hindu yang bersembahyangan Melasti memasukan pecahan uang dalam bentuk koin atau uang kertas. Dari fenomena tersebut nampaknya umat Hindu di Blitar masih kurang antusias menyalurkan punia melalui kotak punia dalam rangka menyalurkan punia harta milik pribadinya.

4) Punia sebagai Wujud Kebersamaan

Punia pada esensinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Pemberian sesuatu kepada orang lain bisa terjadi karena keharusan dalam menjalankan kaidah agama atau karena alasan kemanusiaan. Memberikan uang kepada gelandangan dipinggir jalan, karena iba, memberikan sumbangan pembangunan tempat ibadah di pinggir jalan karena ingin mendapat pahala. Dalam Hindu, punia untuk tujuan niskala (Tuhan) biasanya umat Hindu

lebih tertarik, sehingga kuantitasnya lebih besar. Anggapan ini terjadi karena punia untuk Tuhan tidak akan terkorupsi.

Punia sebaiknya tidak memandang kepada siapa diberikan, tetapi manfaat punia. Manfaat punia selain berdampak pada diri juga pada orang lain. Pemanfaat punia yang cukup luas hingga banyak orang menggalang dana dengan berbagai cara yang bervariasi. Penyediaan pembangunan tempat ibadah juga memerlukan dana yang cukup besar, sehingga ada yang penjangkungannya mendatangi rumah ke rumah, ada yang minta dipinggir jalan dengan memanfaatkan ketulusan setiap orang yang melintas. Metode tersebut adalah dari bagian upaya mereka untuk mengumpulkan uang. Metode pengumpulan tersebut terkadang kurang baik jika diberikan penilaian sesuai dengan interpretasi masing-masing. Yang perlu di apresiasi bukan perihal metodenya, tetapi manfaatnya yang bisa membantu orang lain.

Punia adalah ajaran bagi umat Hindu merupakan kegiatan sosial yang mencerminkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap kebutuhan pihak lain. Atas kepedulian tersebut, umat Hindu menyumbangkan secara sukarela sebagian dari hartanya untuk kepentingan sosial yang lebih luas dari pada kepentingannya sendiri. Punia dilakukan untuk kelompok atau individu yang membutuhkan atau kurang mampu, tetapi juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan social keagamaan dan atau dalam membangun tempat social keagamaan. Di satu sisi punia bermanfaat bagi pihak lain, di sisi lain bermanfaat bagi pihak pemberi punia sebagai pengendalian diri dari keserakahan. Punia bukan sekedar bertujuan untuk diri sendiri (karma-pahala), tetapi sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak bisa hidup dengan orang lain. Seperti ibaratnya memakai baju, manusia tidak mungkin membuat baju dengan membuat bahan baju sendiri, sebagian besar dibuat oleh orang lain, bahkan hampir semua bahan baju membutuhkan orang lain.

BagawatgitaXVII.20 dijelaskan; Sedekah yang diberikan tanpa mengharapkan kembali dengan keyakinan sebagai tugas untuk memberikan pada tempat dan waktu yang tepat dan kepada orang yang patut disebut sattvika.

Pada saat orang tidak mampu memberikan harta, pada saat tidak tahu berilah mereka pengetahuan. Pada saat mereka tidak mampu memberikan harta, bantulah dengan tenaga. Pada saat lemah bantulah agar kuat. Apa yang dilakukan semua itu adalah memberikan sesuatu untuk kebutuhan yang diinginkan. Punia /pemberian tidak mengenal batas wilayah, agama, gen, ras, bangsa. Sehingga banyak penggiat kemanusiaan untuk memberikan /punia karena sebagai bagian kemanusiaan.

Punia dalam bentuk tenaga bisa diwujudkan dalam kegiatan gotong royong. Dalam pelaksanaan pembangunan pura, pengerjaan pisik terkadang ada beberapa yang dilakukan secara gotong royong untuk efisiensi biaya. Gotong royong pembangunan pura melibatkan para penyungsum pura yang secara suka rela tanpa memandang usia dan biasanya dimulai dari orang yang rajin. Ketika seorang memulai gotong royong, berdatangan juga beberapa makan dan minuman untuk menghilangkan rasa harus dan lapar. Aktifitas gotong royong berpotensi membuka kesadaran umat seiring gesekan naluri budaya pekewuh, mereka yang kurang rajin merubah pola kepatuhan dan melebur dalam aktivitas gotong royong. Walaupun pembangunan pura dilakukan dengan semangat gotong royong, namun tidak menghilangkan kewajiban umat Hindu untuk tetap memberikan sebagian harta mereka untuk punia. Alih-alih punia sebagai dasar pelaksanaan nilai ajaran yadnya, sedangkan gotong royong merupakan ciri kebersamaan masyarakat Hindu Blitar yang menyadari sebagai bagian dari masyarakat.

5) Punia Membangun Kohesi Sosial

Umat Hindu Kabupaten Blitar mengekspresi emosi keagamaannya melalui kegiatan keagamaan baik secara kelompok maupun individu. Kegiatan kelompok dijadwal sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama baik di rumah maupun di pura. Kegiatan keagamaan melibatkan berbagai elemen sosial keagamaan dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi umat Hindu. Hidup beragama tidak sekedar melaksanakan ajaran agama, melainkan juga membutuhkan eksistensi. Perayaan kegiatan keagamaan yang megah tidak juga sekedar menjalankan prosesi dan ritual, melainkan kebutuhan pengakuan. Seperti dharma santi mengundang pejabat penguasa wilayah, sekedar untuk memberi ruang perlindungan dan kesetaraan dengan agama lain. Oleh karena itu kegiatan keagamaan memerlukan dana yang cukup besar. Walaupun umat Hindu di Blitar tergolong minoritas, tetapi penggalangan punia tidak pernah dilakukan di pinggir jalan, ditempat hiburan, rumah makan dan sebagainya. Mereka dalam mempertahankan eksistensinya lebih memilih tempat yang proporsional walaupun relatif sedikit. Keterbelakangan dalam pengalangan punia diperlukan sinergi berbagai elemen masyarakat Hindu. Membangun kesadaran punia tidaklah mudah, banyak hal yang harus dilalui. Faktor sosial dan ekonomi menjadi hal yang penting untuk dipahami. Dengan berbagai pencerahan pada saat persembahyangan di pura, terkadang tidaklah memenuhi harapan untuk menggalang punia, namun orang-orang yang berkepentingan (panitia, parisada, organisasi keagamaan Hindu) tidak henti memikirkan dan berjuang untuk menggalakkan punia.

Punia yang dikumpulkan sedikit demi sedikit kemudian diadministrasikan dan digunakan sesuai urgensinya. Hasil punia akan digunakan untuk kegiatan pura beserta piodalan maupun kegiatan sosial keagamaan Hindu lainnya. Punia tidak digunakan sepenuhnya sebagai belanja barang dan jasa, tetapi sebagai modal. Barang dan jasa yang bisa dikerjakan umat, sebagian dikerjakan berpautan ataupun sistem gotong royong.

Hindu di Blitar tidak saja disimbolkan adanya pura saja, tetapi juga eksistensi berbagai element sosial keagamaan Hindu yang dikomandoi oleh parisada. WHDI, Peradah, Pasraman adalah kelompok-kelompok sosial keagamaan yang dalam mengembangkan eksistensi melalui berbagai kegiatan dengan mengumpulkan dana melalui iuran kelompoknya. Sekulerisasi kelompok sosial keagamaan di Blitar dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya juang umat untuk tidak ketergantungan pihak lain. Berbagai pihak dengan gencarnya menggalang punia dengan mengumpan berbagai sloka untuk daya tarik ber punia. Namun kondisi dan kebutuhan tiap keluarga Hindu yang kian terus meroket siring dengan perubahan nilai rupiah, sehingga seolah-olah nilai teologi hanya merupakan sisi luar yang jauh dari arti dan makna ajaran ketuhanan (keimanan). Hal ini merupakan tantangan internal Umat Hindu. Terkait dengan permasalahan teologi, Rumadi (2002:24) mengatakan sebagai berikut. Teologi pada dasarnya meniscayakan manusia untuk tunduk pada akidah agama, sehingga manusia harus terikat, tunduk tanpa *reserve*, karenanya manusia menjadi “tidak bebas”, sedangkan “pembebasan” lepas dari segala bentuk belenggu keterikatan struktural dan kultural, termasuk keterikatan dari keyakinan dan aturan-aturan tertentu. Atas dasar itu, kata “teologi” berarti tidak membebaskan, tetapi mengikat. Berkenaan dengan itu, umat Hindu di Kabupaten Blitar pun batinnya masih terikat oleh teologi punia sebagai penyucian diri dan jiwa secara total untuk memohon keselamatan dan rejeki yang berlimpah sepanjang masa.

III. PENUTUP

Punia adalah ajaran yang memiliki dimensi sosial dan juga spiritual. Secara sosial punia membentuk sikap dan perilaku yang peduli terhadap kebutuhan pihak lain. Secara spiritual punia sebagai pengendalian diri dari keserakahan. Atas kepedulian tersebut, umat Hindu menyumbangkan secara sukarela sebagian dari hartanya untuk kepentingan sosial yang lebih luas dari pada kepentingannya sendiri. Punia dilakukan untuk kelompok atau individu yang membutuhkan atau kurang mampu, tetapi juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan social keagamaan dan atau dalam membangun tempat social keagamaan. Punia tidak saja diwujudkan materi, tetapi punia bisa diwujudkan tenaga, pengetahuan, keahlian, dorongan moral, pengendalian indria. Punia dilaksanakan atas dasar perintah ajaran agama serta nilai kemanusiaan. Kesadaran dan kepedulian berdana punia bagi umat Hindu menjukan sikap antusias umat dalam mengamalkan ajaran agama.

Daftar Pustaka

- Agus, Bustanudin 2006. Agama Dalam kehidupan Manusia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Gede Pudja & Tjok Rai Sudharta. 1998. Manawa Dharma sastra- Weda Smrti
- Kleden, Paul Budi & Sunarko.Andrianus.2010.Dialektika Sekulerisasi.Diskusi Hebermas-
Ratzinger dan Tanggapan. Lamaera- Bantul Yogyakarta.
- Majalah Raditya 6 Sempetmber 2002
- Mas Putra. Ny. I Gst Ag 1982. Upakara Yadnya.
- Nyoman Kajeng, 1999 Sarascamuscaya. Paramita Surabaya.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 2002. Komplikasi Dokumen Literer 45 Tahun Parisada.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 2006. Hasil-hasil Mahasabha IX Parisada
- Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 2009. Hasil-hasil Pesamuan Agung Parisada Tahun2009.
- PGAHN 6 Th Singaraja.1986.Nitisastra Dalam bentuk Kakawin.Proyek Penerangan dan
Bimbingan Dakwah Agama Hindu dan Budha.
- Robertson, Roland.1995. Agama Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi.Jakarta. PT.
Rajagrafindo Persada.
- Wiana. I Ketut.2000. Makna Agama Dalam Kehidupan. Denpasar. PT. BP
- Roland Robertson,ed.1995.Agama.Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi. Raja Grafindo
Jakarta.
- Rumadi, 2002. *Masyarakat Post-teologi: Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*.
Bekasi: Gugus Press.
- Setia,Putu 2002. Dana Punia. Denpasar; Raditya: Majalah Hindu No.61 Agustus 2002.
- Suseno. Franz Magnis.1991.Etika Jawa. Jakarta. PT.Gramedia.